



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I - 2025

SKIPM PANGKALPINANG

Kompleks Perkantoran
Pemprov. Kep. Bangka Belitung,
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434
Email : op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam mendukung visi, misi, serta sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini disusun sebagai sarana transparansi, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan, serta menjadi tolok ukur atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran nyata mengenai capaian kinerja SKIPM Pangkalpinang selama periode Triwulan I Tahun 2025, baik dari sisi operasional, pengelolaan sumber daya, maupun capaian indikator prioritas lainnya. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai serta pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas SKIPM Pangkalpinang selama Triwulan I Tahun 2025.

Pangkalpinang, 03 April 2025

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Strategi Organisasi	2
1.4. Sistematika Penyajian	3
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	4
2.2. Pengukuran Kinerja	6
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1. Capaian Kinerja	7
3.2. Analisis dan Evaluasi	7
3.3. Realisasi Anggaran	13
BAB 4. PENUTUP	14
4.1. Kesimpulan	14
4.2. Rekomendasi	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025	4
Tabel 2	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I 2025	13
Tabel 3	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I 2025	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Pangkalpinang	2
Gambar 2.	Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja	7

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, atas capaian kinerja selama periode Januari hingga Maret 2025. Laporan ini disusun berdasarkan pendekatan performance-based accountability dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian kinerja SKIPM Pangkalpinang Triwulan I Tahun 2025 diukur berdasarkan realisasi terhadap 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi dalam 3 Sasaran Kegiatan (SK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh nilai 114,32 yang termasuk dalam kategori "Istimewa" menurut klasifikasi capaian strategi instansi. Nilai ini mencerminkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).

Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
7. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
9. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
10. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).

11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
12. Persentase rencana umum pengadaan (PBJ) yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
14. Jumlah inovasi pelayanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (unit).
15. Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).

Pada Triwulan I Tahun 2025, SKIPM Pangkalpinang melaksanakan kegiatan melalui program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 5.788.481.000. Hingga akhir triwulan ini, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 1.130.484.774, atau setara dengan 19,53% dari total pagu yang tersedia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan good governance adalah prinsip akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap entitas penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan amanat tersebut, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu instrumen utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi media evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dalam penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang memiliki mandat penting dalam mendukung kebijakan strategis nasional, khususnya dalam menjamin mutu, keamanan, dan keberterimaan hasil perikanan baik di pasar domestik maupun internasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKIPM Pangkalpinang selama kurun waktu Januari hingga Maret 2025. Laporan ini juga diharapkan menjadi alat kendali bagi manajemen internal dalam meningkatkan kinerja organisasi, serta menjadi sarana komunikasi dan transparansi kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

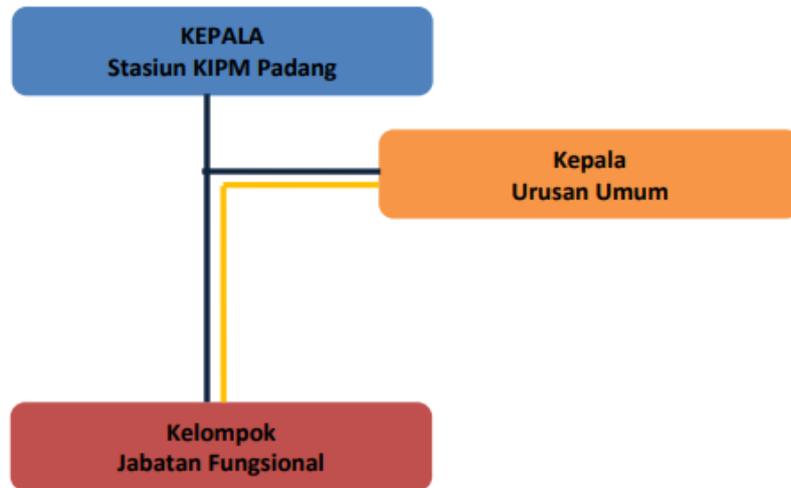
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran; pelaporan; hubungan masyarakat; organisasi dan tata laksana; persuratan; kearsipan; dokumentasi; rumah tangga; serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas teknis pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing pejabat fungsional, yang meliputi di antaranya pengendali mutu hasil perikanan, analisis mutu, dan pengawas perikanan.

Kelompok Jabatan Fungsional, yang meliputi pejabat fungsional Karantina Ikan, Pengendali Mutu, Pengawas Perikanan, Analis Kepegawaian, dan tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Struktur organisasi ini mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan secara menyeluruh, serta memastikan penyelenggaraan layanan publik yang profesional dan sesuai standar Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Pangkalpinang

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program Stasiun KIPM Pangkalpinang disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis SKIPM Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, dengan dukungan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)

Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar, dengan indikator:

4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)

Sasaran Kegiatan 3 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang didukung oleh indikator sebagai berikut:

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Nilai)
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang (Nilai)
8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)
10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)
14. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Unit)
15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)

Sasaran-sasaran di atas menjadi kerangka arah strategi dan operasional pelaksanaan program serta kegiatan pada SKIPM Pangkalpinang selama Tahun 2025, dengan pendekatan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil (outcome).

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Triwulan I Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I–Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- c. Bab III–Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV–Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran dan indikator kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	70
		.3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	92

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)	71,5
	8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	100
	9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Indeks)	87
	10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)	86
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	85
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	76
	13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	70%
	14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Unit)	1
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)	88

Berdasarkan rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2025, terdapat enam indikator yang menjadi target capaian Triwulan I Tahun 2025. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%).
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%).
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%).
4. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (nilai).
5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%).

6. Persentase Rencana Umum Pengadaan (PBJ) yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).

Keenam indikator tersebut menjadi fokus evaluasi utama SKIPM Pangkalpinang dalam mengukur kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Capaian terhadap indikator-indikator tersebut mencerminkan tingkat kesiapan dan efektivitas pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, kualitas pelayanan publik, serta ketaatan terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel.

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

- 4) Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut



≥ 100
(BAIK)



$70 \leq X \leq 99$
(CUKUP)

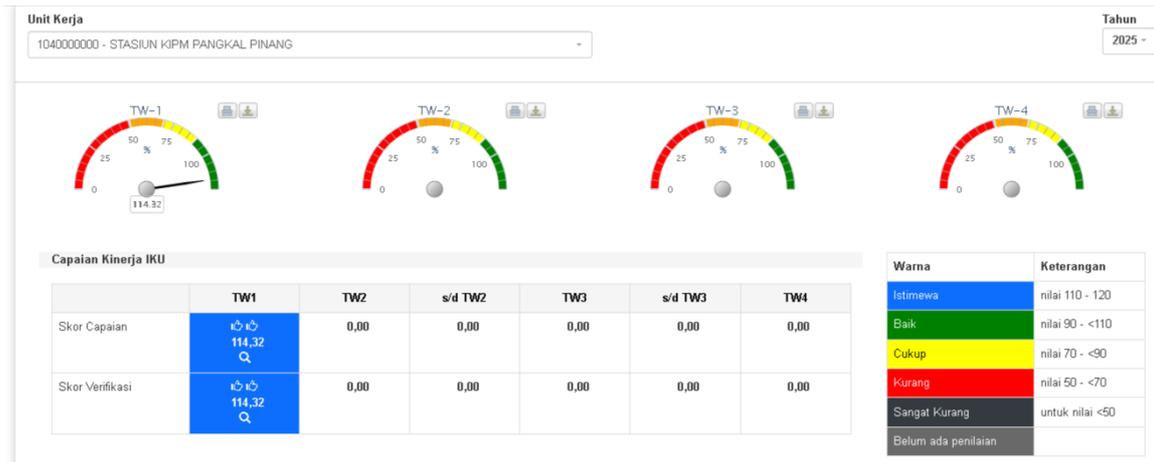


$X < 70\%$
(KURANG)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja SKIPM Pangkalpinang Triwulan I Tahun 2025 mendapat predikat istimewa, hal ini ditandai dengan nilai capaian kinerja sebesar 114,32%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yagn memenuhi standar mutu dan kemandangan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana produk hasil kelautan dan perikanan dari sektor produksi primer telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan.

Sektor produksi primer mencakup kegiatan budidaya perikanan—meliputi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), serta Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)—dan perikanan tangkap yang mencakup Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Hasil Perikanan, mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan teknis lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) menjadi pendekatan utama dalam menjamin mutu dan keamanan pangan sejak dari hulu. Hasil dari kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk

rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan hasil inspeksi, baik melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun secara manual.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70%, sedangkan realisasi capaian pada Triwulan I mencapai 100%, atau setara dengan capaian kinerja 120%. Hasil ini menunjukkan komitmen kuat dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan mutu oleh SKIPM Pangkalpinang, serta tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	70	100	120	Tercapai melebihi target

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi produk perikanan yang telah melalui proses pasca panen dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan standar keamanan pangan yang berlaku.

Sektor pasca panen mencakup kegiatan seperti penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, yang bertujuan untuk menjaga mutu, memperpanjang masa simpan, serta meningkatkan nilai tambah produk. Kesesuaian standar mutu dinilai berdasarkan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta kepemilikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh unit pengolahan, dengan ruang lingkup yang merujuk pada jenis produk, proses, dan potensi bahaya yang ditangani.

Upaya menjamin mutu dan keamanan pangan dilaksanakan secara menyeluruh melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) dari tahap pra-produksi hingga tahap akhir distribusi, dengan rujukan standar baik dari SNI, Codex Alimentarius, maupun standar lain yang disyaratkan dalam sistem perdagangan nasional dan internasional.

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 70%. Hasil pelaksanaan kegiatan di Triwulan I menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang berarti tingkat capaian kinerja mencapai 120%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem jaminan mutu pasca panen di wilayah kerja SKIPM Pangkalpinang telah berjalan optimal dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	70	100	120	Tercapai melebihi target

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator untuk mengukur perbandingan antara volume atau jumlah produk perikanan yang diterima oleh negara tujuan dengan total produk yang diajukan untuk ekspor. Nilai indikator ini mencerminkan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu yang dilakukan oleh SKIPM Pangkalpinang dalam menjamin kesesuaian produk ekspor dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara mitra dagang.

Semakin tinggi rasio ini, semakin menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan efektif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan nasional, tetapi juga memperkuat daya saing sektor perikanan Indonesia di tingkat global.

Setiap produk perikanan yang diekspor diwajibkan memenuhi berbagai standar dan persyaratan teknis dari otoritas kompeten negara tujuan seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya. Pemenuhan standar tersebut antara lain melalui implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mencakup penerapan HACCP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta sertifikasi mutu lainnya sesuai peraturan perdagangan internasional.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 99%. Capaian pada Triwulan I menunjukkan realisasi sebesar 100%, atau setara dengan 101,01% dari target, yang menandakan bahwa seluruh produk yang diajukan untuk ekspor telah diterima oleh negara tujuan. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar mutu ekspor dan membuktikan kinerja pengawasan yang baik oleh SKIPM Pangkalpinang.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	99	100	101,01	Tercapai sesuai target

Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

IK11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan, baik internal maupun eksternal, sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, standar mutu, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, setiap rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti secara nyata dan dijadikan pijakan dalam melakukan perbaikan menyeluruh terhadap proses kerja organisasi.

Di lingkungan UPT SKIPM Pangkalpinang, pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan meliputi berbagai perbaikan, seperti penyempurnaan prosedur layanan, penguatan sistem manajemen, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Pelaksanaan rekomendasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 85%. Hingga Triwulan I, indikator ini berhasil direalisasikan sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 117,65%. Hasil ini mencerminkan bahwa seluruh rekomendasi yang diterima telah dimanfaatkan secara maksimal dan efektif untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	85	100	117,65	Seluruh rekomendasi ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal

IK12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah. RUP disusun oleh setiap satuan kerja dan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk menginformasikan secara terbuka kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar nilai pengadaan barang/jasa yang telah diumumkan melalui SIRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan yang dimiliki oleh satuan kerja. Semakin tinggi persentase pengumuman RUP, maka semakin baik kualitas perencanaan pengadaan serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Ketentuan mengenai kewajiban penyusunan dan pengumuman RUP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 11 ayat (1).

Pengukuran indikator ini dihitung dengan rumus berikut:

$$(\text{Nilai RUP yang diumumkan di SIRUP} / \text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}) \times 100\%$$

Apabila jumlah nilai pengadaan yang diumumkan melebihi pagu pengadaan, maka kelebihan tersebut akan dihitung sebagai pengurang capaian dalam analisis indikator ini. Oleh karena itu, ketepatan nilai dan kesesuaian dengan pagu menjadi aspek penting.

Langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan oleh UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang antara lain:

1. Melakukan koordinasi antara operator SIRUP, KPA, dan PPK terkait rincian kegiatan pengadaan.
2. Menginventarisasi rencana kegiatan dan anggaran dalam dokumen RKA-K/L.
3. Melakukan unggah data kegiatan pengadaan barang/jasa secara lengkap dan tepat waktu ke dalam aplikasi SIRUP.

Pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 76%, dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 120%. Data capaian ini menunjukkan bahwa SKIPM Pangkalpinang telah melaksanakan pengumuman RUP secara maksimal sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	%	76	100	120	Pengumuman RUP dilakukan tepat waktu dan sesuai pagu

IK13. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi yang dihasilkan dari pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan publik. Survei ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk

mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan, dalam hal ini UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang.

Pengumpulan data IKM dilakukan menggunakan sistem survei elektronik (e-survey SKM), melalui laman resmi <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Melalui aplikasi ini, para pengguna jasa dapat menyampaikan pendapat dan penilaian mereka secara langsung terhadap layanan yang mereka terima.

Kuesioner survei disusun berdasarkan 9 unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan Sarana dan Prasarana

Setiap unsur memiliki bobot yang sama, yakni:

$$\text{Bobot per unsur} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Nilai IKM dihitung dengan metode rata-rata tertimbang dari nilai persepsi masyarakat terhadap tiap unsur pelayanan, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = A = \left(\frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur yang Terisi}} \right) \times \text{Bobot Penunjang}$$

Pada Triwulan I Tahun 2025, nilai IKM yang diperoleh oleh UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah 94,38, dari target yang ditetapkan sebesar 88. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 107,25%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui ekspektasi pengguna jasa dan ditanggapi secara positif oleh masyarakat.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	Nilai	88	94,38	107,25	Capaian di atas target, menunjukkan kepuasan masyarakat sangat baik

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM PANGKALPINANG pada tahun anggaran sebesar Rp. 5.788.481.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.596.471.000 dan PNPB sebesar Rp. 192.010.000

Realisasi penyerapan anggaran SKIPM PANGKALPINANG pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp. . 1.130.484.774 atau sebesar 19,53 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Pangkalpinang T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	5.439.481.000	1.128.234.774	20,74
2	Pengendalian Mutu	205.000.000	750.000	0,37
3	Manajemen Mutu	144.000.000	1.500.000	1,04
	TOTAL	5.788.481.000	1.130.484.774	19,53

Tabel 3. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Belanja Pegawai	3.081.582.000	735.054.940	23,85
2	Belanja Barang	2.706.899.000	395.429.834	14,61
	TOTAL	5.788.481.000	1.130.484.774	19,53

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari nilai capaian kinerja sebesar 114,32% dari total 15 indikator kinerja utama yang ditetapkan. Beberapa indikator yang menjadi target capaian Triwulan I Tahun 2025, seperti:

- Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (capaian: 120%),
- Persentase hasil sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (capaian: 120%),
- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor (capaian: 101,01%),
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (capaian: 117,65%),
- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan di SIRUP (capaian: 120%), serta
- Survey Kepuasan Masyarakat (capaian: 107,25%), menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi serapan hingga akhir Triwulan I mencapai Rp 1.130.484.774,- atau sebesar 19,53% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.788.481.000,-, yang masih berada dalam rentang normal pelaksanaan awal tahun anggaran.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Triwulan I menunjukkan efektivitas pelaksanaan tugas, akuntabilitas pelaporan, serta komitmen terhadap pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

4.2. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya serta mempertahankan pencapaian yang telah diraih, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan koordinasi lintas fungsi dalam rangka memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan agar capaian tetap konsisten dan optimal.
2. Mempercepat realisasi anggaran, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap layanan publik dan dukungan teknis, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap indikator yang belum menjadi target pada Triwulan I, sebagai langkah antisipatif guna menjamin pencapaian target tahunan.

4. Menjaga kualitas layanan publik dan memperkuat umpan balik dari masyarakat melalui optimalisasi kanal survei elektronik, serta terus melakukan perbaikan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat.
5. Memastikan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai prinsip keterbukaan, melalui pengelolaan SIRUP yang tepat waktu dan akurat.

Dengan pelaksanaan rekomendasi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang mampu terus mendorong peningkatan kinerja sekaligus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Dedikasi terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta komitmen terhadap inovasi berkesinambungan, akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat mutu pelayanan dan daya saing organisasi ke depan.